

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank ialah suatu lembaga intermediasi keuangan yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Sehingga, bank mempunyai peran penting dalam perekonomian. Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi pokok intermediasi antara unit *deficit* dan unit *surplus*, serta mempunyai fungsi mentransfer dana (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit defisit (Wardiyah, 2017b: 41). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pada pasal 1, bank adalah lembaga usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pada tahun 1998, Pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pembaharuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menjelaskan bahwa terdapat dua sistem perbankan di Indonesia yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Indonesia, ditegaskan kembali bahwa bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Hal tersebut menjadi alternatif jasa perbankan bagi masyarakat, yang secara bersama-sama mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas

untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan. Perbankan Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan asas syariah dan tidak mengandung unsur-unsur riba. Perbankan syariah terbagi atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbankan syariah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat di Indonesia sejak mempunyai landasan hukum yang memadai yaitu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, diantaranya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang menawarkan terobosan produk baru yang beragam dan peluang yang lebih baik. Salah satunya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan.

BPRS HIK Parahyangan sebagai salah satu bank membuat laporan keuangan sebagai informasi dan kondisi perusahaan pada suatu periode. Laporan keuangan adalah produk akhir dari serangkaian metode pencatatan dan penyimpulan data transaksi bisnis. Laporan keuangan pada dasarnya ialah hasil dari proses akuntansi yang dipakai sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan maupun aktivitas entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Sehingga, laporan keuangan adalah alat informasi yang mempertautkan perusahaan dengan

pihak-pihak yang berkepentingan yang memberitahukan kedudukan kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan (Hery, 2016: 3). Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan dan bentuk pertanggung jawaban manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang menggambarkan performa bank yang telah diterima pada suatu rentang waktu tertentu. Tujuan laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ialah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, maupun perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi seluruh pemakai untuk mengambil keputusan ekonomi (Hery, 2016: 5). Laporan keuangan mempunyai peran yang penting. Bagi perbankan syariah laporan keuangan yang berkualitas sangat dibutuhkan supaya dapat memberikan hasil yang tepat untuk nasabah pendanaan maupun menerima bagi hasil dari nasabah pembiayaan. Sehingga kualitas dalam laporan keuangan sangat dipentingkan.

Kredibilitas laporan keuangan sangat diperlukan karena mempunyai peran dalam pengambilan keputusan. Namun, penyajian laporan keuangan masih terdapat permasalahan. Menurut data hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam IHP (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan) Semester I Tahun 2021 Badan Pemeriksaan Keuangan menyingkapkan 8.483 temuan yang mencakup 14.501 permasalahan terdiri atas 6.617 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.512 permasalahan ketidakpatuhan akan ketentuan peraturan perundang-undangan (BPK RI, 2021: 2).

Laporan keuangan BPRS HIK Parahyangan tahun 2020 terdapat ketidakcocokan dengan standarisasi penyajian laporan keuangan yang tercantum pada PSAK 101 sehingga melanggar sistem pengendalian internal perbankan yang menjamin tersedianya laporan keuangan yang dapat dipercaya karena tidak mengikuti peraturan perundang-undangan atau sistem pengendalian internal yang resmi. Pada Laporan Laba Rugi BPRS HIK Parahyangan tahun 2020 bagian pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib tidak menjelaskan dari jenis pendapatan dari jual beli dan pendapatan dari bagi hasil. Seharusnya menurut PSAK 101 seluruh pendapatan tersebut harus jelas jenis-jenisnya.

Gejala ketidakpatuhan penyajian laporan keuangan BPRS HIK Parahyangan terhadap standar penyajian laporan keuangan tersebut melanggar karakteristik pokok kualitatif informasi keuangan syariah menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan bermanfaat dan berguna bagi pemakai merupakan karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan yang mencakup yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan (Yaya dkk., 2018: 82).

Dampak tidak dijelaskan dari jenis pendapatan tersebut maka BPRS HIK Parahyangan tidak mengindahkan empat pokok karakteristik kualitas laporan keuangan. Ketidakpatuhan tersebut menyebabkan para pemakai laporan keuangan internal dan eksternal sulit memahami dan kurangnya informasi tentang pendapatan yang telah diterima bank pada suatu periode.

Serta laporan keuangan tersebut tidak dapat mengevaluasi kinerja bank dalam mempersembahkan pembiayaan kepada nasabah, sehingga informasi laporan keuangan tidak relevan dan tidak dapat diandalkan karena ketidaksesuaiannya dengan standarisasi laporan keuangan syariah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 101. PSAK Nomor 101 adalah tentang penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah dan entitas yang berorientasi laba (Nurhayati & Wasilah, 2015: 102).

Kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh banyak indikator yang mempunyai peranan masing-masing yang saling berkesinambungan demi mencapai kualitas laporan keuangan yang andal. Diantara yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal dan penerapan *good corporate governance*. Peneliti mengambil kedua faktor tersebut yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada penelitian ini.

Sistem pengendalian internal menurut Tuanakotta (Rosdiani, 2011: 14), meliputi rancangan entitas dan seluruh metode serta kebijakan yang terkoordinasi dalam suatu entitas untuk melindungi aset, memeriksa ketelitian dan seberapa jauh data akuntansi dapat diandalkan, menggiatkan efisiensi usaha serta memotivasi ditaatinya kebijaksanaan pimpinan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Pasal 1 menyatakan Sistem Pengendalian Internal ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan semua pegawai untuk memberikan kepastian

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Jaehong dkk, menyatakan bahwa secara konseptual sistem pengendalian internal akuntansi internal yang buruk adalah dasar untuk pelaporan keuangan berkualitas rendah (Adiputra & Siregar, 2018: 294). Mulyati dkk, (2019: 69-70) memberikan pernyataan bahwa mekanisme kontrol dalam proses pengelolaan keuangan merupakan sistem pengendalian internal, sehingga kualitas laporan keuangan dapat tercapai, dan pada hakikatnya laporan keuangan entitas sektor publik mesti disampaikan secara transparan kepada seluruh *stakeholder*, bersifat partisipatif serta dapat dipertanggungjawabkan karena merupakan cerminan pengelolaan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian internal yang kurang sempurna akan sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan suatu perusahaan. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang bisa dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank atas ketentuan perundang-undangan yang sah dan dapat memangkas risiko kerugian, penyelewengan, serta pelanggaran aspek kehati-hatian. Sehingga, sistem pengendalian internal menjadi sangat bernilai dalam perusahaan untuk melindungi kekayaan perusahaan tersebut (Rokhlinasari & Hidayat, 2016: 493). Serta, struktur pengendalian internal suatu entitas sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan. Struktur pengendalian internal yang memadai dapat meminimalkan penyimpangan

sehingga kualitas laporan keuangan yang diperoleh dapat lebih dipercaya dan andal (Yadnyana, 2007: 2). Sehingga, sistem pengendalian internal yang bagus, akan meningkatkan kualitas laporan keuangan serta informasi yang diterima stakeholder menjadi lebih sebanding terhadap manajer, yang berarti *asymmetric information* (ketidaksamaan informasi) yang terjadi dapat berkurang bahkan tidak terjadi. Pada penelitian Rokhlinasari & Hidayat (2016) sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun dalam penelitian Hemawan, Diana, & Mawardi (2020), mengungkapkan, bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain sistem pengendalian internal, laporan keuangan yang disajikan secara wajar dan baik, juga didukung oleh penerapan *good corporate governance* (Jauhari, 2016: 10). *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai tambah bagi *stakeholders*. *Good Corporate Governance* adalah prinsip perusahaan yang sehat serta harus diterapkan dalam penyelenggaraan perusahaan yang dilaksanakan hanya demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan dan maksud perusahaan (Kalsum dkk., 2021: 130).

Good corporate governance menempati posisi yang penting demi keberhasilan perusahaan. Krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin disebabkan oleh karena kegagalan penerapan *good corporate governance*. Indonesia yang merupakan bagian Asia merasakan dampak dari krisis ekonomi politik yang sangat besar hingga banyak perusahaan yang tidak dapat bertahan

dan bangkrut. *Corporate governance* yang buruk dianggap menjadi indikator penyebab krisis terjadi dan sampai saat ini dirasakan dampaknya. Setelah itu, istilah *good corporate governance* menjadi isu yang terkemuka. Oleh karena itu, seluruh pihak memiliki tekad untuk bangkit dari keterpurukan yakni harus memulai dengan tata kelola yang baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah hingga perusahaan swasta. Berbagai upaya untuk memperbaiki tata kelola dilakukan dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* di semua lini. Kemudian, pemerintah mengenalkan konsep dan prinsip *good corporate governance*. Krisis keuangan di Amerika Serikat membawa beberapa nama perusahaan ternama dan terpercaya mengalami keterpurukan, antara lain kasus skandal keuangan Enron Corp, Worldcom, Xerox, dan beberapa perusahaan lainnya. Kasus-kasus tersebut melibatkan lemahnya prinsip *good corporate governance* dan lemahnya kualitas laporan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut (Meliani, 2018: 462).

Fenomena yang terjadi pada BPRS HIK Parahyangan pada tahun 2020 baru melakukan penyempurnaan sebagai organisasi yakni BPRS HIK mengangkat Komisariss Independen dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan sebagai upaya BPRS HIK Parahyangan memenuhi ketentuan POJK nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Penerapan *good corporate governance* dapat memberikan manfaat terhadap beberapa bagian, misalnya dalam hal terbinaanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik melalui peningkatan kinerja, operasional dan

layanan terhadap *stakeholders*. Pelaksanaan ketentuan *good corporate governance* sangat bermakna bagi perusahaan termasuk perbankan syariah, hal ini untuk memperlihatkan terhadap adanya *public accountability* yang berhubungan dengan operasional bank syariah yang diharapkan untuk mengikuti prinsip-prinsip yang telah diberlakukan dalam hukum positif (Nisa, 2021: 19-20). Sehingga, semakin baik penerapan *good corporate governance* maka akan memunculkan dampak yang positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan *good corporate governance* yang baik pada suatu entitas dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangan berdasarkan prinsip transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan wajar maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Khusus pada perbankan syariah terdapat prinsip-prinsip syariah yang mendukung terlaksananya prinsip *good corporate governance* yaitu adanya keharusan bagi subjek hukum termasuk bank syariah untuk menerapkan prinsip kejujuran (*shiddiq*), kepercayaan (*amanah*), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), dan profesional (*fathonah*) (Dewi, 2020: 8).

Prinsip *good corporate governance* yang utama terdapat lima yaitu transparan, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan fairness. Transparan menurut OECD *Board of Directors* suatu perusahaan diwajibkan melaporkan kepada pemegang saham secara akurat, transparan dan tepat waktu segala hal yang berkaitan dengan kondisi keuangan, perubahan kepemilikan, kinerja bisnis dan hal penting lainnya yang dapat mempengaruhi perusahaan (Pieris & Wiryawan, 2007: 139-140). Oleh karena itu, informasi

dan kondisi keuangan perbankan yang disuguhkan dalam laporan keuangan akan lebih berguna bagi para pemakai karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang bermutu akan membantu para investor supaya tidak salah dalam mengambil keputusan untuk menginvestasikan dananya pada suatu perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kredibilitas laporan keuangan mampu mempengaruhi perkembangan perusahaan dan kelanjutan rancangan bisnis yang disusun oleh manajemen. Menurut Newel & Wilson secara teoritis penerapan *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin terjadi dan secara umum dapat meningkatkan kepercayaan investor (Dwiridotjahjono, 2009: 102). Oleh karena itu, penerapan *good corporate governance* sangat membantu para investor atau stakeholder untuk membuat keputusan yang maksimal karena adanya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam penelitian Nisa (2021) penerapan *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun dalam penelitian Hasanah (2020) mengungkapkan bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan dan terdapat faktor-faktor selain *corporate governance* yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan telah banyak dilakukan dikarenakan laporan keuangan yang berkualitas memiliki konsekuensi terhadap kualitas laporan keuangan suatu perusahaan (Nisa, 2021: 6-7).

Alasan peneliti melaksanakan penelitian pada BPRS HIK Parahyangan Cileunyi, Bandung karena sebelumnya tidak ada yang melakukan penelitian tentang kualitas laporan keuangan pada bank tersebut. Lalu, penelitian ini dilaksanakan karena ada *Research GAP* yang tidak konsisten. Berikut *Research GAP* nya :

Tabel 1.1
Research GAP Kualitas Laporan Keuangan

No.	Variabel	Peneliti	Hasil
1.	Sistem Pengendalian Internal	Rokhlinasari & Hidayat (2016)	Berpengaruh Signifikan
		Hemawan, Diana, & Mawardi (2020)	Tidak berpengaruh
2.	Penerapan <i>good corporate governance</i>	Nisa (2021)	Berpengaruh signifikan
		Hasanah (2020)	Tidak berpengaruh

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Syariah Pada BPRS HIK Parahyangan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Apakah ada pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan syariah di BPRS HIK Parahyangan ?
2. Apakah ada pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan syariah di BPRS HIK Parahyangan ?

3. Apakah ada pengaruh sistem pengendalian internal dan penerapan *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan syariah di BPRS HIK Parahyangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan yang ingin diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan syariah di BPRS HIK Parahyangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan syariah di BPRS HIK Parahyangan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh sistem pengendalian internal dan pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan syariah di BPRS HIK Parahyangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademik
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperkaya wawasan mengenai pengembangan ilmu akuntansi syariah mengenai sistem pengendalian internal, penerapan *good corporate*

governance pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan kualitas laporan keuangan syariah.

- b. Dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal, penerapan *good corporate governance* dan kualitas laporan keuangan syariah.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di bidang keilmuan maupun pengembangan ilmiah bagi penulis maupun pembaca sebagai bentuk aplikasi dari pembelajaran perkuliahan.
2. Kegunaan Praktis
- a. Bagi praktisi, penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi bahan pertimbangan serta masukan dalam sistem pengendalian internal dan penerapan *good corporate governance* dalam penyusunan laporan keuangan syariah pada perbankan syariah.
 - b. Bagi Universitas, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangsi bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Jurusan Akuntansi Syariah.
 - c. Bagi masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui tingkat kinerja suatu badan melalui kualitas laporan keuangan syariah.